

# **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

Lita Permata Sari<sup>1)</sup>, Nanik Hariyana<sup>2)</sup>

## **Abstract**

*Public sector reforms in response to the criticism of inefficiency, unproductive, always loss, low quality, lack of innovation and creativity. To see the existence of the public sector in financial management, in particular the financial performance of local governments, this study will look at the effect of the Local Revenue earned by each region in 38 districts / cities in East Java and Audit Opinion provided by the Supreme Audit Board of the financial statements local government financial performance. The purpose of this study to determine whether there is influence of local revenue and audit opinion on the local government financial performance. This research uses multiple regression analysis with software SPSS 22. The results of research, analysis describes the local revenue and audit opinions have no effect on financial performance local governments in 38 districts / cities in East Java.*

*Keywords: Local Revenue, Audit Opinion, Financial Performance*

## **Pendahuluan**

Pada tahun 1970-an banyak kritikan yang ditujukan kepada sektor publik, yang keberadaannya dianggap tidak efisien, jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta (Mardiasmo, 2002:15). Menurut Mahmudi (2010:34), organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas serta berbagai kekurangan lainnya. Buruknya kinerja sektor publik mendorong suatu gerakan reformasi manajemen di sektor publik yang sejak tahun 1980-an dikenal dengan *New Public Management* (NPM) (Hood, 1995). Pendekatan NPM digambarkan sebagai bentuk revitalisasi sektor publik dalam rangka menuju pemerintahan yang lebih menekankan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas (Hood, 1995; Boston et al., 1996).

Reformasi yang terjadi di sektor publik disertai juga memanfaatkan reformasi sistem akuntansi sebagai salah satu sarannya (Carlin, 2005). Reformasi sistem akuntansi dianggap

sebagai hal yang penting karena memiliki peran dalam keberhasilan penerapan NPM. Salah satu bentuk penerapan NPM adalah akualisasi akuntansi di sektor publik. Di Indonesia, penerapan akuntansi akrual diawali dengan diterbitkannya PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di tahun 2003, semangat dari reformasi pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai acuan dalam pengembangan sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara menjadi lebih nyata sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Halim dan Kusufi, 2012). Undang-undang tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada international best practises. Perkembangan dalam pengelolaan keuangan negara memunculkan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam prosesnya pemerintah pusat/daerah mengambil peran dan tanggung jawab melaksanakan perubahan yang terjadi dalam sistem pengelolaan keuangan negara tersebut.

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan tersebut, pemerintah terus berupaya mengembangkan kebijakan akuntansi yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Secara berkelanjutan berbagai peraturan ditetapkan sampai akhirnya pemerintah mempertegas dengan diterbitkannya Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrua.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan standar yang mempunyai

kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Halim dan Kusufi, 2012). SAP inilah yang menjadi pedoman penerapan sistem akuntansi basis akrua. Dirjen Keuangan Daerah, Yuswandi A. Temenggung menyatakan bahwa Penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 harus mulai diterapkan secara penuh baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah per 1 Januari tahun 2015 ([www.keuada.kemendagri.go.id](http://www.keuada.kemendagri.go.id)).

Di Indonesia, penerapan sistem akuntansi berbasis akrua sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten. Di antaranya, Pemerintah Kabupaten Semarang dan Sleman yang telah berhasil melaksanakan sistem akuntansi akrua (Bastian dan Gatot, 2003). Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah mulai melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrua ([www.bantenraya.com](http://www.bantenraya.com)). Namun pada kenyataannya, tidak semua Pemerintah Daerah telah melaksanakan akuntansi berbasis akrua. Hal ini terjadi karena kendala dan masalah yang dihadapi masing-masing Pemerintah Daerah berbeda-beda.

Kondisi di atas memberikan gambaran bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrua yang begitu kompleks. Keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrua salah satunya dapat dinilai dari opini Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang diperolehnya. Salah satunya dengan penerapan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrua LKPD kabupaten/ kota telah dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pandangan berbeda dari Kumorotomo (2009) yang menyatakan bahwa terdapat masalah akuntabilitas di Indonesia. Sehubungan dengan *administrative accountability* dan *professional accountability*, isu pokok yang ada yaitu buruknya kinerja penyelenggaraan anggaran daerah.

Masalah tersebut dapat dilihat dari semakin sedikitnya LKPD yang memperoleh (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu hal yang penting untuk dilakukan ialah pengukuran kinerja keuangan daerah, karena bagian penting dari pemulihan dalam sektor pemerintahan yaitu dengan menyusun pengukuran kinerja (Greiling, 2005).

Opini dalam laporan LKPD tersebut mengungkapkan ketidakpatuhan dan kepatuhan pada Peraturan yang memiliki pengaruh langsung serta material terhadap penyajian laporan keuangan (BPK RI, 2011). Keberhasilan pemerintah daerah dalam mendapatkan opini WTP, akan mempengaruhi keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah (Suwanda, 2015). Kuntadi, 2008 dalam Nurdin 2014 menyatakan bahwa dalam LKPD dapat dilihat berapa dana APBD yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, terdapat faktor lainnya dalam mempengaruhi keberhasilan suatu pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sukses atau tidaknya pemerintah daerah. Besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya

informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah PAD. Selain PAD, peneliti juga mempergunakan variabel hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini terkait latar belakang masalah diatas adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan opini audit pada kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

dan potensi yang ada pada kewenangannya.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Bastian (2006), yaitu untuk menilai kinerja keuangan dalam hal efisiensi dan efektifitas. Mandell (1997) dan Vago (2008) menyatakan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah dapat memperoleh

## **Kajian Literatur**

### **Pendapatan Asli Daerah**

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bastian, 2006). PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penelitian mengenai keterkaitan pendapatan asli daerah (PAD) dengan kinerja keuangan dilakukan oleh, (Julitawati 2012) menemukan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan hasil penelitian Marfiana (2013) menunjukkan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Karena pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar pasti memiliki tekanan yang lebih besar pula dari masyarakat untuk lebih baik dalam mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya guna perbaikan kinerja. Dari data di atas, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Jawa Timur.

### **Gambaran Umum Opini Audit**

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Terdapat empat opini yang dikeluarkan oleh BPK RI, yaitu *unqualified* (wajar tanpa pengecualian/WTP), *qualified* (wajar dengan pengecualian/ WDP), *adverse* (tidak wajar /TW), dan *disclaimer* (tidak memberikan pendapat/TMP).

Keempat opini tersebut opini terbagus adalah *unqualified* yang berarti bahwa laporan LKPD telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Sedangkan opini terjelek adalah tidak wajar karena informasi laporan keuangan (LKPD) tidak diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipakai oleh penggunanya. Dan berbeda dengan disclaimer terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), sehingga baik opini *adverse* maupun *disclaimer* tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Sehingga, jika opini yang diterima oleh pemerintah daerah adalah WTP menunjukkan kinerja pemerintah daerah sudah memenuhi standar yang ditentukan.

Dari penjelasan di atas keterkaitan kinerja pemerintah daerah dengan opini audit maka dapat dibuat hipotesis:

H2: Terdapat pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Jawa Timur

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi/hasil kerja yang dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu (Bastian, 2006). Agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera.
2. Perlakukan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (*on-going process*)
3. Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi.

Dalam membangun dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja di bidang keuangan daerah, dapat menggunakan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan sesuai dengan berbagai aspek dan unsur dalam bidang keuangan daerah, yang menyangkut pencapaian kinerja komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah/PAD (khususnya pajak daerah dan retribusi daerah), pendapatan daerah. Dengan demikian pencapaian kinerja keuangan daerah dapat dilakukan pengukuran secara rinci dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

### **Metode Penelitian**

#### **Lokasi dan Obyek Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur pada tahun 2016. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka misalnya: pendapatan asli daerah, opini audit dari BPK. Menurut sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, BPK RI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Obyek dalam penelitian ini adalah 38 pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melakukan wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang bersumber dari literatur-literatur yang relevan dan berasal dari : Badan Pusat

Statistik (BPS) dan BPK dan instansi terkait lainnya. Data tahun 2016 yang digunakan adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Jawa Timur
2. Pendapatn Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2016
3. Hasil Opini Audit Kabupaten/Kota Jawa Timur

Selain itu, dilakukan juga penelusuran melalui internet, buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan rujukan.

### Metode Analisis

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling*, dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari serta mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengakses laporan keuangan tahun 2016.

Statistik deskriptif memberikan deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2012). Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dilanjutkan dengan Uji asumsi klasik, dimana pengujian untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat agar terbebas dari gejala asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas Untuk menguji normal atau tidaknya sebuah model dapat dilakukan dengan melakukan uji kolmogorov-sminarnov. Data dikatakan berdistribusi normal apabila koefisien Asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Korelasi antar sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas (Utama, 2012:105). Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas

dilakukan dengan uji Glejser (Utama, 2012:106). Model regresi dikatakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Analisis regresi linier berganda adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit BPK RI pada kinerja pemerintah daerah yang akan diuji dengan tingkat signifikansi.

Persamaan yang dihasilkan dari hubungan antar variabel tersebut adalah sebagai

berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots (1)$$

Y : Kinerja Keuangan

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_2$ : Koefisien variabel independen

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Opini audit

Uji kelayakan model (uji F) dan uji hipotesis (uji t). Hasil uji F yang signifikan apabila nilai  $F_{sig} \leq 0,05$  yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2012). Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian parsial merupakan nama lain dari uji t apabila variabel bebas yang digunakan lebih dari satu.

### Hasil Analisis dan Pembahasan Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0<sup>0</sup> hingga 114,4<sup>0</sup> Bujur Timur dan 7,12<sup>0</sup> hingga 8,48<sup>0</sup> Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan)
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Jawa Tengah

d. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali.

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.799,75 km<sup>2</sup> habis terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota. Daerah terluas adalah wilayah Kabupaten Banyuwangi seluas 5.782,40 km<sup>2</sup>.

### Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Hasil audit BPK (opini audit) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilansir melalui website BPK ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)) tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017, yaitu sejumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota.

**Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	38	109532988,00	13670200000000,00	53167315967,1317	2289714484940,99760
OpiniAudit	38	,00	1,00	,7895	,41315
KK	38	,79	2,72	1,0153	,29520
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data Diolah

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki Nilai minimum Rp 109.532.988.000 yang menunjukkan PAD terendah di daerah Kota Batu pada Tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum Rp 13,67 Triliun, yang menunjukkan PAD daerah Kabupaten Pamekasan. Untuk kinerja keuangan memiliki nilai minimum 0,79 dan maksimum 2,72 dengan jumlah sampel sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

### Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

#### Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen, yaitu PAD dan

Opini audit berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen atau kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah hasil uji statistik t dengan SPSS 22.

**Tabel 2. Hasil Uji Statististik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Kesimpulan
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	1,190	,102			11,668	,000	
PAD	-3,137E-15	,000	-,024	-,151	-,881	,381	H1= ditolak
OpiniAudit	-,220	,115	-,307	-,193	-,065	,952	H2= ditolak

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil di atas PAD memiliki nilai signifikansi 0,881, artinya PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Demikian juga, nilai signifikansi Opini audit sebesar, 0,065 yang menunjukkan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur belum terlalu memperhatikan hasil opini audit untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Sehingga meskipun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mendapatkan opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini tidak berpengaruh terhadap baik tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### Uji Statistik F

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji statistik F dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut

tabel. F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 untuk sampel 38 adalah sebesar 1,76. Berikut ini adalah hasil uji statistik F dengan SPSS 22.

**Tabel 3 Uji Statistik F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,311	2	,156	1,870	,169 <sup>a</sup>
	Residual	2,913	35	,083		
	Total	3,224	37			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), OpiniAudit, PAD

Sumber: Data diolah

Tabel 5.3 menunjukkan nilai  $F=1,870 > F \text{ tabel}=1,76$ , dengan nilai signifikansi 0,169, yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan pengaruh PAD dan Opini audit secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil uji parsial dan bersama-sama, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran, diantaranya:

- Untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dilihat pada pengaruh PAD dan Opini audit, lebih ditekankan pada menambah jumlah tahun dalam sampel penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan satu tahun, yaitu pada tahun 2016.
- Dengan dua variabel yang diteliti, alangkah lebih luas cakupannya untuk meneliti variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka

- Boston, J., Martin, J., Pallot, J., dan Walsh, P. 1996. *Public Management: The New Zealand Model*. New Zealand: Oxford University Press.
- Carlin, T. M. 2005. Debating the impact of accrual accounting and reporting in the public sector. *Financial Accountability and Management*. 21 (3): 309–336.
- Greiling, D. 2005. Performance Measurement in the Public Sector: the German Experience. *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 54, pp
- Halim, A., dan Kusufi, S. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hood, C. 1995. The 'New Public Management' in the 1980s: Variations on a Theme. *Accounting, Organizations and Society*. 20 (2): 93-109.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2014. *Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*. <http://www.keuada.kemendagri.go.id>.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. 2013. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja sektor Publik* (edisi ke-2). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017. Jawa Timur Dalam Angka 2017.

